

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PELAKU USAHA
YANG MENJUAL BERAS OPLOSAN DENGAN TIDAK MENCANTUMKAN
LABEL DAN ATAU INFORMASI YANG JELAS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk)**

**Disusun Oleh:
SISKA SILVIA SUYADI
E1A018033**

ABSTRAK

Peredaran produk pangan khususnya beras di masyarakat dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memanipulasi beras biasa menjadi premium untuk memperoleh keuntungan bagi produsen dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun dalam pengemasannya tidak ada label dan atau informasi yang jelas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini.

Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk bahwa pelaku usaha telah bersalah karena mengedarkan beras yang merupakan hasil oplosan tanpa adanya label dan atau informasi yang jelas dalam kemasannya dan diketahui bahwa konsumen telah mendapatkan upaya perlindungan bagi konsumen untuk melindungi hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf a dan c dengan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku usaha menggunakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Beras Oplosan

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS DUE TO BUSINESSES WHO
SELL OPLOANT RICE WITHOUT INCLUDE LABELS AND OR CLEAR
INFORMATION BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION (Study Decision Number:
153/Pid.Sus/2020/PN.Plk)**

**Written By:
SISKA SILVIA SUYADI
E1A018033**

ABSTRACT

Circulation of food products, especially rice in the community, in reality there are still many business actors who manipulate ordinary rice into premium to gain profits for producers and cause harm to consumers, but in the packaging, there is no clear label or information, therefore the authors are interested in researching this matter.

This study was structured using a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The source of data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained are presented in the form of descriptions that are arranged systematically and the data analysis method used is a qualitative normative method.

Based on the results of research on the decision of the District Court Number: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk that business actors have been guilty of circulating rice which is the result of adulteration without clear labels and or information on the packaging and it is known that consumers have received protection measures for consumers to protect consumer rights contained in Article 4 letters a and c with judges imposing criminal penalties on business actors by using Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter i of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Oplosan Rice